

Satu Langkah Penting: Kebijakan Timor Leste Menyepakati MoU *Joint Ministerial Statement* dengan Indonesia Tahun 2002

Farah Agnis Fithria

Departement Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

E-mail:

fithriaagnisfarah@gmail.com

Abstract

This article will discuss the cooperation established by Timor Leste and Indonesia in 2002 through the MoU Joint Ministerial Statement. Timor Leste is a country that has been occupied by Indonesia for 24 years, and during that time there was a lot of treatment from the Indonesian government which was felt to be a stepchild of Timor Leste and gave the impression that it paid little attention to that country. Because of this, the people of Timor Leste protested with demonstrations demanding separation from Indonesia. However, not long after officially becoming an independent country, Timor Leste adopted a policy to agree to open diplomatic relations with Indonesia. Based on the brief explanation above, the author formulates the research question as: Why did Timor Leste agree to sign a Memorandum of Understanding on the Joint Ministerial Statement with Indonesia in 2002? This article will use qualitative and analytical descriptive methods with research library data collection techniques where the data obtained comes from books, reputable scientific articles and the internet. The theory that the author will use is the Decision Making Theory.

Keywords: *Timor Leste; Indonesia; foreign policy; Cooperation*

Abstrak

Artikel ini akan membahas tentang kesepakatan kerjasama yang dibangun oleh Timor Leste dan Indonesia pada tahun 2002 melalui MoU Joint Ministerial Statement. Timor Leste adalah negara yang telah di duduki oleh Indonesia selama 24 tahun, dan selama itu banyak perlakuan dari pemerintah Indonesia yang di rasa menganaktirikan Timor Leste dan terkesan kurang memperhatikan negara itu. Karena hal ini masyarakat Timor Leste melakukan protes dengan demonstrasi menuntut pemisahan dari Indonesia. Namun tidak berselang lama setelah resmi menjadi negara yang merdeka, Timor Leste mengambil sebuah kebijakan untuk menyepakati membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Berdasarkan penjelasan singkat diatas maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian menjadi: Mengapa Timor Leste menyepakati penandatanganan nota kesepahaman Joint Ministerial Statement dengan Indonesia pada tahun 2002? Tulisan ini akan menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data library reaserch di mana data-data yang diperoleh bersumber dari buku-buku, artikel ilmiah bereputasi maupun internet. Teori yang akan dipakai penulis adalah Teori Decision making Process.

Kata Kunci: Timor Leste; Indonesia; Kebijakan Luar Negeri; Kerjasama

1. Pendahuluan

Perkembangan tatanan dunia yang baru membuat negara-negara di dunia kini memiliki orientasi yang condong terhadap pola-pola hubungan yang lebih kooperatif. Pola yang kooperatif ini diwujudkan dalam suatu kerjasama yang di dasari oleh kepentingan suatu negara. Kepentingan inilah yang menjadikan pemerintah suatu negara mengambil suatu kebijakan luar negeri sebagai alat dalam menghadapi suatu isu serta menyangkut pemenuhan kepentingan negaranya.

Timor Leste adalah negara baru yang lahir di panggung dunia. Negara tersebut meraih keutuhan kedaulatannya secara resmi pada tanggal 20 Mei 2002 melalui sidang *United Nations Transitional Administration in East Timor* UNTAET yang di tandai dengan penyerahan kekuasaan administrasi kepada pimpinan Timor Leste (Misdar, 2021). Sebelum kemerdekaannya, momen penuntutan disintegrasikan Timor Leste dengan Indonesia sangat digaung-gaungkan oleh kelompok-kelompok pro kemerdekaan timor leste.

Alasannya karena masyarakat Timor Leste pada saat itu sudah tidak ingin di duduki oleh Negara atau bangsa lain seperti Portugis selama 450 tahun (1515-1975), dan Indonesia yang telah menduduki Timor Leste selama 24 tahun (1976-1999) (Myrntinen Freie, 2009). Alasan terkuat lainnya adalah pasca kejadian Santa Cruz, penangkapan Xanana Gusmao,

dan krisis moneter di Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya orde lama dan masuknya masa reformasi. Dari rentetan peristiwa tersebut, masyarakat Timor Leste yang dipelopori oleh kelompok pro kemerdekaan memilih untuk lepas dari pendudukan Indonesia dan membentuk suatu pemerintahan sendiri.

Karena gejolak yang sangat tinggi dari masyarakat Timor Leste, Indonesia yang kala itu dibawah pemerintahan presiden B.J. Habibie akhirnya melakukan referendum bersama lembaga dari PBB yaitu UNAMET. Badan khusus yang dibentuk PBB ini bertugas untuk mengkoordinasikan setiap proses pelaksanaan seperti mengatur dan mengusahakan pemilihan secara langsung, rahasia dan universal sebagai dasar penentuan suara masyarakat Timor Timur (Dyah Wijyatmi, 2004). Pada tanggal 30 Agustus 1999 dan memberikan dua opsi yaitu, pertama adalah memberikan otonomi khusus untuk masyarakat Timor Timur dalam NKRI, dan opsi kedua adalah menolak opsi pertama dan pemisahan diri Timor Timur dari NKRI (Deutsche Welle , 2019). Pada saat itu sebagian besar masyarakat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dimana hal itu menjadi titik balik bagi masyarakat Timor Leste untuk seutuhnya melepaskan diri dari bagian NKRI.

Pasca di umungkannya hasil referendum tersebut, situasi di Timor Leste menjadi

semakin kacau dengan adanya kerusuhan, perusakan, sampai dengan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kontra disintegrasi. Untuk mengatasi hal ini, dibentuklah INTERFET (International Force for East Timor) yang merupakan suatu badan keamanan khusus di bawah PBB bertugas untuk menjaga perdamaian Timor Leste yang beranggotakan berbagai negara salah satunya Australia.

Secara resmi Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan diakui kemerdekaannya secara internasional pada tanggal 20 Mei 2002, dimana semenjak hari kemerdekaan itu Timor Leste dengan cepat berusaha memutuskan bahkan menolak campur tangan Indonesia didalam negaranya dan mengganti namanya dengan Republik Democratic Timor Leste.

Namun, di tahun yang sama tepatnya pada tanggal 7-8 Oktober 2002 pemerintahan Timor Leste secara pro aktif melakukan pertemuan antara perwakilan Indonesia dan Timor Leste. Pada pertemuan itu yang menjadi juru bicara mewakili Timor Leste adalah Jos Ramos Horta dan yang mewakili Indonesia adalah menteri luar negeri Hassan Wiradjuda yang beragendakan adalah penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk membentuk *Joint Ministerial Statement (Commission For Bilateral Cooperation)* (Francisca Rosario Da Silva, 2013). Gambaran sederhana mengenai perjanjian ini adalah

suatu pembukaan hubungan diplomatik berkomitmen antara kedua negara (Dyah Wijyatmi, 2004). Selain itu, pada pertemuan ini juga ditunjuk duta besar pertama Timor Leste untuk Indonesia (OCHA, 2002).

Hal ini menjadi suatu anomali untuk dibahas lebih lanjut karena dari apa yang telah dijabarkan diatas bahwa sebelumnya Timor Leste telah memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan Indonesia pasca memperoleh kemerdekaan namun, justru berbalik arah untuk membuka hubungan kerjasama melalui *MoU Joint Ministerial Statement* dengan Indonesia

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada tulisan ini menjadi:

Mengapa Timor Leste menyepakati kerjasama dengan Indonesia melalui penandatanganan nota kesepahaman *Joint Ministerial Statement* pada tahun 2002?

2. Kerangka Pemikiran

2.1 Teori *Decision Making Process*

Penelitian ini akan menjelaskan alasan dari kebijakan yang diambil oleh Timor Leste melalui penandatanganan *MoU Joint Ministerial Statement* dengan Indonesia pada tahun 2002. Selain itu, artikel ini akan lebih lanjut menganalisis mengenai kerjasama bilateral antar kedua negara serta interaksinya pada masa lalu. Untuk mempermudah proses

analisa, maka artikel ini akan menggunakan teori *Decision Making Process* dari William D Coplin (1992).

Dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Politics*, Coplin membahas mengenai Teori *Decision Making Process* di mana teori tersebut digunakan untuk menjabarkan suatu cara negara dalam mengambil keputusan yang dihadapkan dengan suatu isu tertentu (Coplin, 1992). Menurut Coplin, proses pengambilan keputusan atau kebijakan luar negeri yang rasional dan dapat menguntungkan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat di dalam negeri yang mampu menata kehidupan sosial secara struktur dan sistematis, mampu beradaptasi satu sama lain dan mampu berintegrasi dengan modal ekonomi, politik, sosial budaya dan pendidikan (Coplin, 1992)

Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan suatu negara menurut Coplin dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pertama, kondisi internal dalam negeri. Mengutip dari kata-kata Coplin "*to determine the way foreign policy works, it can be observed from the domestic situation of a country*" Pernyataan dari Coplin tersebut mengartikan bahwa arah suatu kebijakan luar negeri yang di buat dipengaruhi oleh dinamika atau situasi politik dalam negeri.

Selain itu kondisi ekonomi dan militer juga menjadi potensi dasar yang

mempengaruhi kebijakan luar negeri yang di ambil. Pembentukan suatu kebijakan luar negeri erat kaitannya dengan hal ini karena negara-negara memiliki perilaku yang mana bergantung kepada perdagangan dan kemampuan militernya. Kesejahteraan negara dan seberapa besar kekayaan yang di miliki oleh negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya merupakan kapasitas dalam sektor ekonomi yang harus di penuhi. Negara yang memiliki sektor ekonomi rendah terutama dalam memproduksi barang dan jasa domestik yang masih terbatas, mengharapkan arus impor dari negara lain.

Selain kondisi ekonomi, militer juga mempengaruhi dalam pengambilan suatu kebijakan luar negeri, ini di karenakan negara harus memiliki pasukan militer yang mumpuni dan juga memiliki ketersediaan senjata, pelatihan dan lain sebagainya. Selanjutnya negara juga membutuhkan dukungan militer dari luar negeri untuk mengamankan dan kedaulatan negara sehingga hal itu dapat mendukung dengan kekuatan-kekuatan dalam pengambilan kebijakan luar negeri.

Faktor kedua, konteks internasional. Mengutip dari tulisan Coplin yang mengatakan bahwa "*International condition is a product of foreign policy of states in the past, present, or even future that might be or be anticipated*" (Coplin W. , 2013). Penentuan arah kebijakan luar negeri juga dipicu oleh kondisi eksternal,

dimana suatu negara yang menduduki suatu wilayah geografis berkaitan dengan hubungannya dengan negara-negara lain yang berada dalam lingkup yang sama. Interdependensi ekonomi yang berkaitan dengan pola perdagangan dan politis yang berkaitan dengan pola aliansi yang telah disebutkan diatas juga termasuk kedalam konteks internasional. Sikap aktif pemberian suara terhadap suatu isu dalam sidang Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menjadi suatu konteks internasional yang merupakan salah satu penentu arah kebijakan luar negeri (Coplin, 1992)

Faktor ketiga adalah aktor pengambil kebijakan. Sikap dan pandangan dari aktor sebagai pengambil suatu keputusan final yang melalui proses pertimbangan panjang juga sangat menentukan arah kebijakan luar negeri yang di ambil. Terdapat empat jenis aktor dalam pengambilan kebijakan luar negeri menurut Coplin, pertama pemerintah atau jajaran yang duduk didalam birokrasi suatu negara, kedua para kelompok-kelompok kepentingan atau partai politik, ketiga individu yang mewakili kelompok masyarakat tertentu, keempat masyarakat yang berada di negara tersebut (Coplin W. , 2013).

Dalam kasus yang di temui, pemimpin suatu negara (Presiden, Perdana Menteri, atau Raja) memainkan peran dominan proses pengambilan keputusan luar negeri. Pengambil

keputusan memerlukan dukungan dari pemberi pengaruh kebijakan sebagai dukungan untuk memperkuat kebijakan. Hal ini membuat para *policy maker* mampu mengakumulasi isu-isu umum dalam negeri, dan mampu berinteraksi dengan aktor-aktor lainnya yang memberikan dukungan-dukungan positif sehingga dapat menghasilkan kebijakan luar negeri yang mewakili dan mencerminkan kepentingan nasional suatu negara.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melihat pada proses dan pemaknaan atas relaitas sosial yang terjadi. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses penelitian yang memfokuskan pada strategi atau teknik pengumpulan data yang bersifat non-numerik yang bertumpu pada penggunaan kata-kata (Lamont, 2015). Selanjutnya, Penelitian ini bersifat deksriptif-eksplanatif karena menjelaskan secara naratif mengidentifikasi sebab akibat isu dalam penelitian (Neuman, 2014).

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan pengumpulan dokumen-dokumen sebagai sumber utama dalam penelitian. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dimana data primer dikumpulkan melalui publikasi-publikasi resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Timor Leste. Guna

melengkapi data primer yang diperoleh tersebut penelitian ini disokong dengan data sukender yang terdiri dari buku atau e-book, jurnal ilmiah bereputasi, dan artikel internet yang dinilai relevan dengan masalah yang akan diteliti. Terakhir data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan data yang ada dengan tujuan dapat mengurangi potensi bias dari sumber data.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Kondisi Domestik Timor Leste

Leste Pasca Merdeka

4.1.1. Kondisi politik dalam negeri Timor Leste

Pada masa lalu, Timor Leste dihadapkan dengan permasalahan yang sebenarnya belum sepenuhnya tuntas bahkan setelah merdeka sekalipun. Permasalahan-permasalahan inilah yang mewarnai dinamika politik Timor Leste pasca merdeka. Seperti pada kasus di mana parlemen Timor Leste mengesahkan Undang-Undang batas wilayah sekaligus perluasan wilayah maritim secara sepihak dengan menetapkan zona ekonomi eksklusif yang secara langsung memasuki wilayah perairan Indonesia (Misdar, 2021). Pemerintah Indonesia merasa dirugikan dan menolak keras undang-undang tersebut, karena penentuan batas wilayah harus memiliki perundingan hingga persetujuan dari negara tetangga yang

memang berbasatan langsung agar tidak terjadi tumpang tindih batas wilayah.

Timor Leste memilih berdialog dengan Indonesia untuk menetapkan titik batas yang merupakan bagian dari kedaulatan teritori negara, politik perbatasan ini juga sebagai kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya (Saldanha, 2018). Selain masalah perbatasan, ada banyak lagi isu-isu lainnya yang belum terselesaikan khususnya dengan Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Timor Leste mencoba membenahi hubungan dengan Indonesia melalui perwakilannya. Diharapkan dari adanya dialog ini stabilitas politik Timor Leste terhadap Indonesia dalam skala normal, semangat saling mendukung untuk terus menjaga ekistensi politik masing-masing jauh lebih baik kedepannya. sehingga aspek pertahanan dan keamanan tidak menjadi faktor untuk menghambat kerjasama di bidang-bidang lainnya

Masalah pengungsi juga bagian yang tidak terpisahkan pasca kemerdekaan Timor Leste. Pasalnya, setelah terjadi referendum tahun 1999 dan terjadi kerusahan antara angkatan bersenjata Indonesia dan pasukan pro kemerdekaan Timor Leste, kebanyakan warga Timor Timur terlebih yang tinggal di wilayah perbatasan tercerai berai mencari tempat

berlindung dimana mereka lebih memilih untuk mengungsi ke teritori Indonesia (Tempo, 2019). Kerusakan tersebut membuat beban psikologis yang harus ditanggung yang menyebabkan trauma tersendiri bagi masyarakat asli Timor Leste kala itu. Adanya rasa takut dan khawatir akan terjadinya kerusakan kembali dimana mereka juga menaruh curiga terhadap aparat keamanan dalam menjamin keamanan mereka (Afrizal & Mulia, 2014). Data terakhir yang diperoleh, sekitar 250.000 pengungsi yang datang ke Indonesia termasuk 4.500 anak-anak yang berpisah dengan orang tuanya mengungsi ke daratan Nusa Tenggara Timur dimana mereka telah disediakan pos-pos pengungsian yang tersebar dari Kabupaten Belu hingga Kupang (Eben Lumbanrau & Kusumadewi, 2016).

Walaupun pada akhirnya ada keterlibatan dari lembaga internasional yaitu UNHCR untuk mengurus masalah pengungsi, namun masalah ini tetap menjadi urusan yang penting bagi kedua negara yang perlu segera diselesaikan dimana kedua pemerintah negara garys kooperatif untuk memastikan apakah para pengungsi tetap ingin tinggal di daratan Indonesia atau repatriasi kembali ke Timor Leste.

4.1.2. Kondisi Pendidikan Timor Leste

Sektor pendidikan timor leste pada awal kemerdekaan juga mengalami banyak sekali permasalahan. Sebelum masuk pada bahasan sektor pendidikan, melihat kilas balik ketika masa pendudukan Indonesia anak-anak asli Timor Leste sempat mengenyam pendidikan yang baik. Anak-anak usia produktif belajar dapat mendaftar kesekolah-sekolah yang telah disediakan oleh Indonesia pada saat itu (Van Klinken, 2014). Struktur pendidikan yang dapat diperoleh dari masyarakat Timor Leste adalah dua tahun pra-sekolah, enam tahun pendidikan dasar, tiga tahun pendidikan menengah pertama, tiga tahun akademik atau pendidikan teknis dan kejuruan, dua tahun pendidikan politeknik, dan tiga hingga empat tahun tahun pendidikan universitas (Human Development Sector Unit, World Bank, 2004). Pada tahun 1976 sampai 1998, dilihat dari laporan tim *Human Development Sector Unit East Asia and Pacific Region* jumlah anak-anak yang mendaftar pendidikan dasar yang kala itu adalah provinsi Timor Timur meningkat dari 13.500 menjadi 165.000 siswa. Selama periode yang sama, pendaftaran sekolah menengah pertama tumbuh dari 315 siswa menjadi 32.000 siswa, dan pendaftaran pendidikan menengah atas meningkat dari 64 menjadi 14.600 siswa, terakait biaya, semua biaya pendidikan adalah bersumber dari

alokasi pemerintah Indonesia karena Timor Timur adalah Provinsi ke 27 Indonesia kala itu.

Namun pasca referendum dan Timor Leste menjadi negara yang berdiri sendiri, situasi berubah. Masalah-masalah yang hadir dalam sektor pendidikan pasca merdeka diantaranya, lembaga-lembaga pendidikan Timor Leste masih sangat minim fasilitas dan material yang terbatas contohnya, tidak adanya perpustakaan yang menyediakan buku-buku lengkap, laboratorium, fasilitas kesenian dan olahraga (Misdar, 2021). Selain itu Sumber daya manusia sebagai pengajar di sekolah maupun di perguruan tinggi Timor Leste kurang memadai yang di tandai dengan kurangnya staff pengajar yang mumpuni, karena kebanyakan tenaga pengajar berasal dari Indonesia yang telah memilih untuk kembali ke Indonesia setelah pemisahan kedua negara (Suartika & Liana, Korban Jajak Pendapat di Timor Timur, 1999, 2015). Diperkirakan sekitar 50% para pengajar termasuk professor asli Timor Leste pada saat itu hanya menyelesaikan stratum satu dan sisanya hanya lulusan diploma, sehingga pembangunan sektor pendidikan pasca kemerdekaan belum terlihat meningkat secara signifikan (Misdar, 2021).

Permasalahan lain yang muncul pada sektor pendidikan Timor Leste adalah pada saat itu pemerintah juga belum menentukan secara resmi peraturan tentang bahasa dalam

proses pendidikan, dan menentukan syarat kurikulum secara resmi yang berdampak pada Timor Leste masih harus berkaca pada sistem pendidikan Indonesia dan Portugis (Misdar, 2021). Selain itu dari beberapa permasalahan yang telah diuraikan diatas, yang paling penting dan serius untuk dapat memperbaiki hal-hal tersebut adalah sumber dana dari pemerintah Timor Leste dibidang pendidikan yang masih minim.

Menyadari bahwa permasalahan dalam sektor pendidikan adalah prioritas untuk pembangunan, mendorong pemerintah Timor Leste untuk membuka kerjasama pendidikan dengan Indonesia khususnya jenjang perguruan tinggi sebagai upaya dalam mencerdaskan sumber daya manusianya. Hal ini diperkuat dengan alasan bahwa sebelum pernyataan secara resmi kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia, ada banyak mahasiswa yang berasal dari wilayah Timor Leste masih dalam proses menempuh pendidikan di perguruan tinggi Indonesia (Misdar, 2021). Maka dari itu pemerintah Timor Leste ingin mahasiswa-mahasiswa tersebut tetap melanjutkan studinya di Indonesia dan dari kerjasama ini setiap tahunnya jumlah mahasiswa yang belajar ke Indonesia terus meningkat dengan harapan dapat membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan setelah lulus dapat mengabdikan dan membangun negerinya kembali.

4.1.3. Kondisi Ekonomi Timor Leste

Sektor ekonomi adalah sektor yang paling krusial, hal ini di karenakan pertumbuhan ekonomi yang stabil di suatu negara akan memperlancar proses pembangunan dalam negeri. Pasca kemedekaan Timor Leste pertumbuhan ekonomi dalam negeri masih tertatih. Upaya rekonstruksi sektor ini telah di canangkan dengan adanya perdagangan barang dan jasa namun belum dapat terlihat hasilnya. Pertumbuhan ekonomi Timor Leste dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Timor Leste

Evolution: Annual GDP Timor Leste 1998-2002		
Year	Annual GDP	GDP Growth (%)
2002	460M\$	-6,7%
2001	477M\$	16.3%
2000	454M\$	58.1%
1999	240M\$	-35.5%
1998	543M\$	-2.1%

Diolah oleh penulis

sumber: GDP Growth annual report, World Bank

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun belum tampaknya kestabilan pertumbuhan ekonomi Timor Leste sebelum atau sesudah merdeka. Pasca merdeka secara resmi pada tahun 2002, persentasi

pertumbuhan ekonomi mencapai nilai minus yaitu -6,7% dengan pendapatan per kapita masyarakatnya 666,7031 dan nilai inflansi sebanyak 5,3% (World Development Indicators, 2021). Hal ini mengakibatkan proses pembangunan dalam negeri menjadi terhambat.

Faktor kerusakan lingkungan khususnya pada lahan pertanian yang dilatarbelakangi kerusakan sebelum kemerdekaan Timor leste juga menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi. Alasannya kerusakan yang terjadi mengakibatkan penurunan kualitas pangan dan rentetetannya produktivitas tanaman pangan rendah (Lopes, Anita, Bexley, & Soekartawi, 2008). Akibat yang lebih dari itu yaitu minimnya bahan-bahan pertanian yang dapat diekspor dari Timor Leste dan karena hal ini pula Timor Leste menggantungkan bahan atau barang-barang impor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakatnya.

Pada saat itu, Timor Leste sangat mengandalkan impor bahan-bahan dari luar, khususnya impor dari Indonesia. Data yang ditemukan adalah, sebanyak 80% barang dan bahan seperti kendaraan bermotor, minyak kelapa sawit, barang elektronik, bahan bangunan peralatan rumah tangga, air minum kemasan, dan lain-lainnya adalah hasil dari pengeksporan Indonesia ke negara tersebut (Nainggolan, 2018).

Maka dari itu Timor Leste perlu membuka dan meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dengan Indonesia guna memberikan kontribusi terhadap ekonomi domestik. Setelah Timor Leste disahkan sebagai sebuah negara berdaulat pemerintah Timor Leste langsung mengirim perwakilan diplomatiknya ke Jakarta (Saldanha, 2018). Orientasi kerjasama Timor Leste dan Indonesia di bidang ekonomi dinilai sangat efektif, yaitu kedua negara sepakat memberikan wewenang dan kebebasan kepada semua aktor untuk berani melakukan hubungan-hubungan diplomasi secara, kelompok, individu maupun lembaga pemerintahan (Saldanha, 2018).

4.1.4. Kondisi Militer Timor Leste

Faktor militer juga menjadi suatu yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan luar negeri Timor Leste. Sebelum deklarasi kemerdekaan secara resmi, Timor leste sebenarnya telah memiliki angkatan bersenjata yaitu gerilyawan yang pro kemerdekaan atau yang memperjuangkan pemisahan diri dari Indonesia. Tokoh-tokohnya seperti Taur Matak Ruak sebagai panglima dan Perdana menteri Xanana Gusmao (Kompas, 2009).

Pada Mei 2001, Timor Leste membentuk pasukan militernya yang dibagi menjadi dua yaitu, pasukan FALINTIL- *Defence Force* Timor Leste atau F-FDTL yang bertugas

menjaga pertahanan negara dari luar atau asing dan pasukan *National Police* Timor Leste atau PNTL yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam negeri. Namun setelah pembentukan pasukan militer ini dengan tugasnya masing-masing, nyatanya terjadi tumpang tindih penugasan. Seperti kejadian pasukan FDTL mengambil peran seperti kepolisian dalam negeri dan pasukan PNTL yang terlibat dalam operasi perbatasan (ISSAT, 2016). Salah satu latar belakang adanya tumpang tindih tugas antara kedua angkatan bersenjata ini karena banyaknya permintaan masyarakat lokal yang ingin F-FDTL juga menjamin keamanan internal bukan hanya fokus pada ancaman eksternal saja, yang mana hal itu sebenarnya merupakan tugas dari PNTL (Pinto, 2003).

Hal ini diperparah dengan belum adanya kebijakan keamanan nasional, yang mempertajam persaingan antara PNTL dan F-FDTL terutama pasca kemerdekaan yang berakibat beberapa kali terjadi bentrok antara keduanya. Salah satu peristiwa bentrok antara kedua lembaga militer Timor Leste ini adalah pada tanggal 8 November 2002 perkelahian antara PNTL dan F-FDTL yang terjadi di Mercado Lama Dili tanggal 8 November 2002 sangat bertentangan dengan keinginan rakyat.

F-FDTL maupun PNTL juga tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni sebab, anggota-anggota dari kedua

pasukan persenjataan ini berasal dari pasukan pro kemerdekaan yang mana berarti tidak ada pelatihan khusus ataupun kelengkapan senjata-senjata yang memadai (Pinto, 2003).

Jika dibandingkan dengan Indonesia, militer Timor Leste pada saat itu masih kalah telak. Indonesia memiliki pasukan militer yang beragam dan solid dengan tugas yang telah ditetapkan seperti, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Korps Marinir, KorMAR, Komando operasi khusus angkatan bersenjata dan Komando cadangan strategis. Performa Militer Indonesia yang dapat dilihat dari pengalaman dimasa lalu dapat dikatakan berada diatas militer Timor Leste. Oleh sebab itu, permasalahan di sektor militer Timor Leste juga patut difokuskan oleh pemerintah, tidak hanya beberapa permasalahan yang dijabarkan diatas tapi juga sebagai negara baru, Timor Leste membutuhkan dukungan kekuatan militer dari luar negeri serta pelatihan-platihan khusus untuk para angkatan bersenjata bercermin dari negara-negara lain yang dapat memelihara kedaulatan negaranya.

Dari beberapa faktor yang telah di jabarkan di atas, menjadi penting bagi Timor Leste untuk membangun sikap yang kooperatif dengan Indonesia. Pasalnya kedua negara pernah berbagi satu daratan yang sama ditambah lagi dengan sumbangsih yang telah di berikan oleh pemerintah Indonesia di masa lalu. Pemerintah Timor Leste memiliki

kepentingan dari hubungan kerjasama ini yang orientasinya dapat saling mendukung di berbagai aspek kehidupan bersama.

4.2. Konteks Internasional Timor Leste

Secara geografis, Timor leste sangat berdekatan dengan Indonesia. Disebelah utara wilayah Timor Leste berbatasan dengan laut Banda selat Wetar, disebelah selatan dekat dengan laut Timor, bagian timur dekat dengan laut Maluku dan di sebelah barat berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur (Geografi Regional Dunia, 2011). Dengan kata lain Timor Leste memiliki perbatasan darat dan laut dengan Indonesia yang cukup dekat. Pada masa lalu batasan-batasan ini menjadi permasalahan yang memunculkan ketegangan.

Seperti pasca merdeka, parlemen Timor Leste mengesahkan Undang Undang batas wilayah sekaligus perluasan wilayah maritim secara sepihak dengan menetapkan zona ekonomi eksklusif yang secara langsung memasuki wilayah perairan Indonesia (Misdar, 2021). Pemerintah Indonesia merasa dirugikan dan menolak keras undang-undang yang telah di buat secara sepihak oleh Timor Leste, karena penentuan batas wilayah harus memiliki perundingan hingga persetujuan dari negara tetangga yang memang berbatasan langsung dengan negara tersebut agar tidak terjadinya tumpang tindih batas wilayah.

Oleh karena itu, pemerintah Timor Leste perlu menelaah ulang kebijakan-kebijakan luar negeri yang akan di ambil khususnya menyangkut batas-batas wilayah. Hal ini di karenakan jika terjadi suatu kesalahan atau tindakan yang menuai reaksi kecaman akan berdampak terhadap hubungan dengan negara-negara tetangga di satu wilayah. Sebagai Negara yang telah menerima kedaulatannya menjadi penting bagi pemerintah Timor Leste untuk juga memperhatikan hal-hal yang menyangkut penyelesaian masalah dan normalisasi hubungan dengan Indonesia. Hal ini juga menyangkut membangun citra baik Timor Leste ke mata Internasional selain bahwa Indonesia juga yang telah berperan lebih banyak karena kedua negara memiliki sejarah bersama di masa lalu. Disamping itu, Timor Leste juga perlu untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara di kawasan regional dan masuk menjadi bagian dari keanggotaan organisasi internasional. Pembukaan hubungan-hubungan diplomatik atau kerjasama internasional menjadi sebuah jalan yang dapat diambil untuk peluang kerjasama yang menguntungkan di masa depan. Adapun dalam organisasi internasional, Timor Leste juga memerlukan status keanggotaan dalam suatu organisasi internasional karena berkaca dari kasus sebelumnya PBB dan beberapa negara telah

berperan dalam memberikan bantuan-bantuan sebelum dan pasca Timor Leste merdeka.

4.3. Pandangan Pemerintah Timor Leste

Setelah melewati masa kelam, pasca kemerdekaan Timor Leste mulai membenahi kondisi domestik dalam negerinya dan menata ulang struktur pemerintahan serta mengambil kebijakan-kebijakan rasional yang di butuhkan untuk keberlangsungan masa depan negerinya. Pemerintah Timor Leste memutuskan untuk menormalisasi hubungan dengan Indonesia yang mana hal ini merupakan cerminan dari kebijakan luar negeri Timor Leste sebagai negara yang telah berdaulat.

Beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Timor Leste tercermin dari keputusan Kay Rala Xanana Gusmao yang mana beliau adalah tokoh yang terpilih menjadi presiden pertama Timor Leste. Xanana Gusmao di kenal sebagai *founding father* Timor Leste yang memiliki kepribadian karismatik dan selalu ikut melakukan manufer politik internasional untuk menjaga kemanan dan perdamaian dunia (Saldanha, 2018). Kebijakan atau keputusan menyangkut persoalan pemerintahan sebagian besar bergantung dan di dominasi juga dari perspektifnya. Menurut Xanana Gusmao terlepas dari sejarah kelam yang kedua negara ini miliki, Timor Leste nyatanya tidak dapat

memusuhi Indonesia, sebab menurutnya Timor Leste terbentuk berkat inklusifitas pemimpin transisi Indonesia saat itu, yaitu Presiden B.J. Habibie (Fatunnisa, 2002).

Pada tahun 2022 Xanana Gusmao dan B.J Habibie sepakat untuk membentuk suatu forum yaitu Indonesia-Timor Leste *Friendship Forum*. Forum ini merupakan sarana untuk memfasilitasi kedua pemerintah terutama Timor Leste sebagai metode *soft power* untuk lebih membuka diri dalam jaringan internasional dan kebijakan luar negerinya dapat menyesuaikan kondisi ekonomi politik kontemporer (Saldanha, 2018). Forum ini memberikan semangat patriotisme dan nasionalis bagi pemimpin kedua negara yang menyadari betapa pentingnya kondisi kerjasama di segala bidang kehidupan masyarakat. Disamping itu, forum ini telah membangun persepsi para pemimpin kedua negara untuk lebih lebih mementingkan perdamaian dan solidaritas antara kedua pemerintah dan masyarakat dari pada saling mencari kesalahan (Saldanha, 2018).

Selain itu, Dr. Jose Ramos Horta selaku salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Timor Leste yang akhirnya menjabat sebagai menteri luar negeri pasca kemerdekaan melakukan praktik diplomasi sebagai bentuk penataan politik luar negeri sesuai dengan situasi geopolitik kontemporer. Jose Ramos Horta memobilisasi agenda diplomasi terbuka

merupakan strategi membangun politik luar negeri Timor Leste (Irham, 2021). Normalisasi hubungan Indonesia dan Timor Leste merupakan salah satu agenda diplomasi terpenting bagi Timor Leste. Terkait hal ini, selaku menteri luar negeri Jose Ramos Horta memberikan pernyataan bahwa konflik masa lalu antara kedua negara bukan suatu halangan untuk hubungan kerjasama yang nantinya akan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Menurutnya, kerjasama antar kedua negara mutlak diperlukan daripada menyemai dendam atas konflik masa lalu (Reditya, 2022).

5. Kesimpulan

Sebagai negara muda yang berdaulat, Timor Leste telah mengambil langkah atau upaya penting untuk memulihkan ketertiban di negaranya. Langkah tersebut diwujudkan melalui kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah. Dimana dalam menentukan suatu kebijakan luar negeri harus melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya, faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari kondisi dalam negeri negara tersebut, konteks internasional, dan pandangan para pengambil kebijakan. Dengan ditandatanganinya MoU *Join Ministerial Statement* pada tahun 2002 dengan Indonesia, terbukalah peluang untuk membangun kerja sama di berbagai sektor guna memenuhi kepentingan nasional dalam pembangunan negara. Sebagai negara terakhir yang

menduduki Timor Leste dan secara geografis merupakan negara tetangga yang sangat dekat, Indonesia tidak hanya meninggalkan kepahitan bagi masyarakat Timor Leste, namun secara tidak langsung Indonesia juga telah berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat Timor Leste.

MoU ini merupakan langkah rasional untuk memulihkan hubungan baik dan kerja sama yang terbuka, karena setiap negara membutuhkan kerja sama. hubungan kerjasama yang efektif dengan negara lain untuk mendukung kepentingan pembangunan negaranya Terkait MoU ini akan mencakup pembahasan yang akan mengatasi sisa-sisa masalah di masa lalu diantaranya, kompleksitas masalah perbatasan, masalah hukum seperti aset pemerintah, perusahaan swasta dan individu, masalah pengungsi, adanya komitmen bersama untuk membangun rasa saling menghormati, memiliki wawasan untuk masa depan bersama serta meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dalam bentuk pembukaan kerjasama pada bidang-bidang tertentu. Selain itu juga pada pertemuan ini membahas mengenai taman makam pahlawan Seroja yang terletak di Timor Leste yang mana kedua negara sepakat untuk menjaga dan melestarikan taman makam tersebut sebagai tanda pengikat hubungan baik dan atas biaya pemerintah Indonesia (OCHA, 2002).

Daftar Pustaka

- Afrizal, & Mulia, Y. (2014). Upaya Indonesia Dalam Repatriasi Warga Eks Timor Timur. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau*.
- Coplin, W. (1992). *Introduction to International Politics*. Syracuse University: Sinar Baru Algensindo, Hal 74.
- Coplin, W. (2013). *Pengantar Politik Internasional (edisi ke-2)*. Sinar Baru Algensindo.
- Coplin, W. (2013). *Pengantar Politik Internasional (suatu telaah teoritis)*. Sinar Baru Algensindo.
- Deutsche Welle . (2019, Agustus 30). *Memperingati 20 Tahun Referendum Timor Timur*. Retrieved November 21, 2022, from DW Web site: <https://www.dw.com/id/memperingati-20-tahun-referendum-timor-timur/a-50223772>
- Dyah Wijyatmi, H. (2004). Hubungan Bilateral RI dan Timor Timur Pasca Kemerdekaan Timor Timur. *Skripsi Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Marer*, 99.
- Eben Lumbanrau, R., & Kusumadewi, A. (2016, Agnustus 17). *Kisah Warga Eks Timor Timur: Memilih Indonesia Lalu Diabaikan*. Retrieved Desember 1, 2002, from CNN Indonesia Web Site:

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160817091559-20-151908/kisah-warga-eks-timor-timur-memilih-indonesia-lalu-diabaikan>
- Estefin Tembalangi, M. (2015). Perpanjangan Misi Peace Building PBB di Timor Leste Periode 2002-2012 . *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, 15.
- Fatunnisa, H. (2002, Agustus 31). *Xanana Gusmao: Meski Miliki Sejarah Kelam, Timor Leste Tetap Butuh Indonesia Sebagai Sahabat*. Retrieved Desember 14, 2022, from RMOL.id Web site: <https://dunia.rmol.id/read/2022/08/31/545729/xanana-gusmao-meski-miliki-sejarah-kelam-timor-leste-tetap-butuh-indonesia-sebagai-sahabat>
- Francisca Rosario Da Silva, L. (2013). KERJASAMA BILATERAL ANTARA TIMOR LESTE DAN INDONESIA. *Skripsi Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur*.
- Geografi Regional Dunia. (2011). *Geografi Negara Timor Leste*. Retrieved November 29, 2022, from Geografi.org Web site: <https://www.geografi.org/2017/08/geografi-negara-timor-leste.html>
- Human Development Sector Unit, World Bank. (2004). *Timor-Leste: Education Since Independence From Reconstruction to Sustainable Improvement*. The World Bank.
- Irham, M. (2021, Juni 13). *Pernah Perjuangkan Kemerdekaan Timor Leste, Ramos Horta Kini Bela Indonesia Soal Papua*. Retrieved Desember 20, 2022, from Tribunnews Web site: <https://makassar.tribunnews.com/2021/06/13/pernah-perjuangkan-kemerdekaan-timor-leste-ramos-horta-kini-bela-indonesia-soal-papua>
- ISSAT. (2016, Oktober 27). *Timor-Leste SSR Background Note*. Retrieved November 24, 2022, from Geneva Centre for Security Sector Governance: <https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Country-Profiles/Timor-Leste-SSR-Background-Note>
- Kompas. (2009, Februari 10). *ICG: Pemerintahan Timor Leste Lemah*. Retrieved November 21, 2022, from Kompas Web site: <https://nasional.kompas.com/read/2009/02/10/07561681/icg.pemerintahan.timor.leste.lemah>
- Lamont, C. (2015). *Reaserch Model in International Relations (1st ed)*. Los Angeles: Sage.
- Lopes, M., Anita, X., Bexley, A., & Soekartawi. (2008). *STUDI SOSIAL*

- EKONOMI PEMAHAMAN KETAHANAN PANGAN DALAM MENUJU KEDAULATAN PANGAN: KASUS DI TIMOR LESTE. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Pertanian*, 1-18.
- Misdar, R. (2021). *Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Timor Leste Tahun 2002-2015*. Guepedia.
- Myrntinen Freie, H. (2009). External Democracy Promotion In Post-Conflict Zones: Evidence From Case Study East Timor. *Jurnal Universitas Berlin*, 3.
- Nainggolan, S. (2018). Hubungan Kerjasama Pemerintah Timor-Leste dengan Indonesia di Sektor Pendidikan Era SBY-Jokowi. *Doctoral dissertation, Program Studi Hubungan Internasional FISKOM-UKSW*, 1-80.
- Neuman, W. (2014). *Social Reaserch Methods: qualitative and quantitative approaches (7th ed)*. Harlow: Pearson.
- OCHA. (2002). *Joint statement: First meeting of the Indonesia - Timor-Leste Joint Ministerial Commission for Bilateral Cooperation*. Jakarta: OCHA.
- Pinto, J. T. (2003). MASA DEPAN YANG AMAN. *Jurnal Universitas Dili Timor Leste*, 1-25.
- Reditya, T. (2022, Juni 7). *Jose Ramos-Horta: Hubungan Erat Indonesia-Timor Leste Buat Banyak Negara Terkesan*. Retrieved Desember 2022, 2022, from Kompas Web site: <https://www.kompas.com/global/read/2022/06/07/164500770/jose-ramos-horta--hubungan-erat-indonesia-timor-leste-buat-banyak-negara>
- Saldanha, P. (2018). Kebijakan Luar Negeri Timor Leste Terhadap Indonesia. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 1-28.
- Suartika, T. (2015). KORBAN JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR, 1999. *Jurnal Pendidikan Sejarah Volume 3, No. 1*, 15-24.
- Suartika, T., & Liana, C. (2015). Korban Jajak Pendapat di Timor Timur, 1999. *Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah*, 3(1)., 15-24.
- Suartika, T., & Liana, C. (2015). KORBAN JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR, 1999. *Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah*, 3(1)., 15-24.
- Tempo. (2019, Agustus 29). *Kisah Pengungsi Timor Timur di Indonesia 20 Tahun Setelah Referendum 1999*. Retrieved from Tempo.co: <https://www.tempo.co/abc/4633/kisah-pengungsi-timor-timur-di-indonesia-20-tahun-setelah-referendum-1999>
- Van Klinken, H. (2014). *ANAK-ANAK TIM-TIM DI INDONESIA : Sebuah*

Cerminan Masa Kelam. Jakarta:

Kepustakaan Populer Gramedia.

Witana, B. (2016). PERANAN INTERFET

(International Force For East Timor)

DALAM PROSES PENGEMBALIAN

PERDAMAIAN DAN KEAMANAN

TIMOR TIMUR TAHUN 1999.

Skripsi Universitas Lampung, 1-64.

World Development Indicators. (2021).